



**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN IZIN
USAHA PEMANFAATAN HAK PENGELOLAAN LAHAN (HPL)
PADA SEMPADAN SUNGAI**

TESIS

**Disusun sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)**

**AZHAR SIDIQ S.
NIM. P2B123049**

**UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
JAMBI
2025**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Karya tulis saya, Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Ilmu Hukum, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Tesis.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang pada catatan kaki dan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam penyiaran ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Jambi, 20 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan

Azhar Sidiq S.
NIM. P2B123049



UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : AZHAR SIDIQ S.

Nomo Induk Mahasiswa : P2B123049

Program Kekhususan : Hukum Pemerintahan

**Judul : Kewenangan Pemerintah Daerah dalam
Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hak
Pengelolaan Lahan (HPL) pada Sempadan Sungai**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini
untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Tesis
Pada Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jambi**

Pembimbing Utama **Jambi, Mei 2025**
Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H.
NIP. 197106061998031001

Dr. Donny Yusra Pebrianto, S.H., M.H.
NIP. 198902232018031001



UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : AZHAR SIDIQ S.
Nomo Induk Mahasiswa : P2B123049
Program Kekhususan : Hukum Pemerintahan
Judul : Kewenangan Pemerintah Daerah dalam
 Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hak
 Pengelolaan Lahan (HPL) pada Sempadan Sungai

**Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Tesis pada Program
 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi
 pada tanggal 16 Juni 2025 dan dinyatakan *LULUS***

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Dr. Taufik Yahya, S.H., M.H.	Ketua Tim Penguji	
Dr. Raden Sarwani, S.H., M.P.A.	Sekretaris	
Dr. Meri Yarni, S.H., M.Hum.	Penguji Utama	
Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H.	Anggota	
Dr. Dony Yusra Pebrianto, S.H., M.H.	Anggota	
Mengetahui, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi	Mengesahkan, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi	

Dr. Hartati, S.H., M.H.
NIP. 197212031998022001

Dr. Taufik Yahya, S.H., M.H.
NIP. 196501071990031002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. atas nikmat, berkat dan rahmat-Nya yang telah diberikan. hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang disusun dalam bentuk Tesis dengan judul “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pada Sempadan Sungai”. Adapun tujuan dari penulis dari penulisan Tesis ini dimaksud untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Penyelesaian penelitian dan penulisan Tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan berupa bimbingan, pengarahan dan dukungan dari berbagai pihak. baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu atas segala bantuan yang telah diberikan tersebut penulis mengucapkan terima kasih. Kepada Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H., selaku Pembimbing utama dan Dr. Donny Yusra Pebrianto, S.H., M.H., selaku Pembimbing pendamping. penulis mengucapkan terima kasih atas segala kesabaran dan waktu yang diberikan dalam membimbing dan memberi arahan, saran, serta nasehat yang berharga selama proses penulisan Tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. terutama pada:

1. Kedua orang tuaku Ayahanda Septa Diano, S.Pd., M.Pd. dan Ibunda St. Maimunah, S.Pd., yang tak pernah Lelah memberikan cinta, kasih sayang, do’a, serta motivasi dalam perjalanan hidupku sehingga menjadi energi

untuk menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.

2. Prof. Dr. Helmi, S.H. M.H. selaku Rektor Universitas Jambi Periode 2024-2028.
3. Dr. Hartati, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.
4. Dr. Taufik Yahya, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. yang telah memberikan arahan tentang judul Tesis sekaligus mengesahkan judul Tesis penulis dan juga telah bekerja keras meningkatkan kualitas program Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi.
5. HJ. Andi Najemi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan administrasi kepada penulis dan telah memberikan petunjuk selama perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan selama mengikuti perkuliahan.
7. Seluruh Tenaga Kependidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu mempermudah dalam pengurusan administrasi selama perkuliahan.

8. Teman-Teman kuliah pada Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi Angkatan 2023 yang selama ini menjadi teman diskusi selama penulisan Tesis ini.
9. Teman-Teman seperjuangan yang selama ini menjadi teman diskusi selama penulisan Tesis ini.

Penulis menyadari. Tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan kemampuan, wawasan, kematangan pemikiran dan pengalaman penulis serta bahan-bahan bacaan/literatur yang penulis dapatkan. Oleh karena itu semua kritik dan saran untuk perbaikan kemajuan kedepan sangat diharapkan dan diterima oleh penulis. Akhirnya semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membaca terutama mahasiswa/i Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi.

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah mengetahui dan menganalisa Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin Usaha Pemanfaatan hak pengelolaan lahan (HPL) di Sempadan Sungai serta Konsep ideal pengaturan Izin Usaha Pemanfaatan hak pengelolaan lahan (HPL) Sempadan Sungai. Dengan Tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin Usaha Pemanfaatan hak pengelolaan lahan (HPL) di Sempadan Sungai?, 2) Bagaimana Konsep ideal pengaturan Izin Usaha Pemanfaatan hak pengelolaan lahan (HPL) Sempadan Sungai Perspektif Kepastian Hukum?. Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum *primer*, bahan hukum *sekunder* dan bahan hukum *tersier*. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi dan menginterpretasi. Hasil penelitian ini adalah Pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal pemberian izin usaha pemanfaatan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Sempadan Sungai terdapat konflik norma antara Pasal 12 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 67 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta banyaknya pelanggaran izin usaha HPL. Rekomendasi diberikan: 1. Sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih norma hukum, serta untuk mewujudkan kepastian hukum. 2. Diperlukan pengembangan sistem perizinan berbasis zonasi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk kawasan sempadan sungai, disertai dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat yang terdampak

Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintahan Daerah, Izin Usaha, Hak Pengelolaan Lahan, Sempadan Sungai

ABSTRACT

The purpose of the study is to determine and analyze the Authority of the Regional Government in granting Business Permits for Utilization of Land Management Rights (HPL) in River Borders and the ideal concept of regulating Business Permits for Utilization of Land Management Rights (HPL) in River Borders. With this objective, the problems discussed are: 1) How is the Authority of the Regional Government in granting Business Permits for Utilization of Land Management Rights (HPL) in River Borders?, 2) How is the ideal concept of regulating Business Permits for Utilization of Land Management Rights (HPL) in River Borders from a Legal Certainty Perspective?. With this formulation of the problem, the research method used is normative legal research with a statute approach, a conceptual approach and a case approach. The legal materials collected are: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Analysis of the collected legal materials is carried out by inventorying, systematizing and interpreting. The results of this study are that the Regional Government's authority in terms of granting business permits for the use of Land Management Rights (HPL) in River Boundaries, there is a conflict of norms between Article 12 paragraph (1) of Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government and Article 67 of Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and the many violations of HPL business permits. Recommendations are given: 1. Synchronization of regulations between the central and regional governments so that there is no overlapping of legal norms, and to realize legal certainty. 2. It is necessary to develop a transparent, accountable, and participatory zoning-based licensing system for river border areas, accompanied by recognition and protection of the rights of affected indigenous communities

Keywords: *Authority, Regional Government, Business Permits, Land Management Rights, River Boundaries*